

Strategi Pemerintah Kota Tangerang Dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks Menjelang Pemilihan Umum 2024

Geri Suratno¹, Yoana Alexandra Rachman²

Universitas Budi Luhur^{1,2}

Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, RT.10/002 12260

geri.suratno@budiluhur.ac.id¹, 2071510784@student.budiluhur.ac.id²

Submitted: 22 April 2024, Revised: 20 Juni 2024, Accepted: 28 Juni 2024

ABSTRACT

This research provides a highly relevant overview of the critical role of fake news and hoaxes in the context of elections and democratic stability in the Tangerang region. The aim of this research is to describe the public communication model applied in eradicating hoaxes ahead of the 2024 elections and to reveal the secrets of the success of the public communication model. Data collection was carried out through in-depth interviews with Tangerang City government officials, analysis of policy documents, and direct observation of community outreach and education activities. The collected data is then analyzed thematically to identify effective communication strategies in fighting hoaxes and fake news. The research results highlight the urgency of building an intelligent and critical society in order to combat the negative impacts of the spread of inaccurate information. The public communication model implemented by the Tangerang City Government shows transparent and proactive steps in dealing with hoaxes. One of the key aspects of this model is ensuring easy access to information for all levels of society. Apart from that, collaboration with the media also shows a holistic approach in fighting hoaxes, by utilizing the power of the media as a means of conveying correct and trustworthy information. This research not only provides a detailed view of effective strategies in dealing with hoaxes, but also reveals the secret to the success of the public communication model implemented by the Tangerang City Government.

Keywords: *General Election; Hoax; Tangerang City*

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran yang sangat relevan mengenai peran kritis hoaks dalam konteks pemilihan umum dan stabilitas demokrasi di wilayah Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan model komunikasi publik yang diterapkan dalam pemberantasan hoaks menjelang Pemilu 2024 dan membongkar rahasia keberhasilan model komunikasi publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah Kota Tangerang, analisis dokumen kebijakan, serta observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi strategi-strategi komunikasi yang efektif dalam melawan hoaks dan berita palsu. Hasil penelitian menyoroti urgensi untuk membangun masyarakat yang cerdas dan kritis agar dapat melawan dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat. Model komunikasi publik yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan langkah-langkah yang transparan dan proaktif dalam mengatasi hoaks dan berita palsu. Salah satu aspek kunci dari model ini adalah memastikan akses informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan media juga menunjukkan pendekatan holistik dalam melawan hoaks, dengan memanfaatkan kekuatan media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Penelitian ini tidak hanya memberikan pandangan terperinci mengenai strategi yang efektif dalam menghadapi hoaks dan berita palsu, tetapi juga mengungkap rahasia keberhasilan model komunikasi publik yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Kata kunci: Hoaks; Kota Tangerang; Pemilihan Umum

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019 ditandai oleh pertarungan retorika yang cenderung sarkastis di media sosial dan media massa, sebagaimana diungkapkan (Megasari, 2020), (Abdullah et al., 2019). Hoaks yang beredar di media sosial dan fakenews dalam media massa menjadi fenomena yang sangat masif pada periode tersebut. Saat ini, menjelang Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, situasinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan cenderung semakin kasar. Penggunaan *gadget* berbasis internet, khususnya telepon pintar, telah mempermudah produksi dan penyebaran hoaks dan *fakenews*, seperti yang diidentifikasi oleh (Sastradipraja et al., 2021) Penelitian yang dilakukan oleh (Zakirah & Marta, 2020) menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan *fakenews* memiliki potensi memicu konflik sosial yang berujung pada polarisasi masyarakat. Dengan kata lain, penyebaran hoaks di media sosial dan fakenews di media massa menjelang Pemilu 2024 dapat menciptakan situasi yang mengancam terjadinya segregasi sosial dan disintegrasi bangsa. Tingginya tingkat kasar dan kontroversi dalam wacana politik di media sosial memperparah dampak negatif dari penyebaran hoaks dan *fakenews*. Kehadiran teknologi, terutama penggunaan internet, sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi yang tidak akurat memperkuat peran hoaks dalam memanipulasi persepsi masyarakat (Ulfa, 2024). Dalam konteks ini, perlu langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini, termasuk upaya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap konten yang beredar di media sosial dan media massa. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama antar *stakeholder*, masyarakat dapat diarahkan untuk menjadi lebih kritis dalam menyaring informasi, mengidentifikasi hoaks, dan mendukung integritas pemilihan umum serta stabilitas sosial (Nasional & Indonesia, 2023).

Sudah banyak penelitian tentang pemberantasan hoaks dan *fakenews* tetapi sedikit yang bersentuhan dengan model komunikasi publik dan menjelang pemilu 2024. Padahal penelitian tentang model komunikasi publik sangat strategis dalam pemberantasan hoaks dan *fakenews*. Apalagi menjelang pemilu 2024 yang secara kasat mata hoaks dan *fakenews* tersebar dan beredar di masyarakat dengan luar biasa masif (Aditiawarman & Mac, 2019). Penelitian tentang pemberantasan hoaks dan *fakenews* dilakukan oleh (Nurlatun et al., 2021) dengan membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran hoaks di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian yang dilakukan oleh (Megasari, 2020) adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangkal hoaks yang ada di masyarakat melalui media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Sabrina, 2019) membicarakan mengenai pengaruhnya, serta cara meningkatkan kecakapannya sebagai upaya menanggulangi hoaks. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dalam mengelaborasi berbagai macam literatur baik berupa buku, jurnal, majalah, maupun literatur yang relevan dengan tema tulisan. Selama ini penelitian yang ada cenderung membahas pada pemicu hoaks dan fakenews, (Lukman Hakim, Achluddin Ibnu Rochim, 2022); (Yashila & Athifahputih, 2022) menyebutkan bahwa ada tiga langkah pemberantasan hoaks dan *fakenews* melalui sosialisasi, kerja sama, dan pengawasan. Sedangkan (Arwendria & Oktavia, 2019) meneliti pemberantasan hoaks di

beberapa situs berita daring berlatar belakang agama (Islam). Dengan demikian ada perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Yakni, penggunaan model komunikasi publik dan menjelang Pemilu 2024.



Gambar 1. Slogan Anti Hoaks Diskominfo Kota Tangerang

Tujuan artikel ini adalah menggambarkan model komunikasi publik yang diterapkan dalam pemberantasan hoaks dan *fakenews* menjelang Pemilu 2024 pun membongkar rahasia keberhasilan model komunikasi publik tersebut. Tentu saja akan menganalisis implikasi penggunaan model komunikasi publik tersebut. Artikel ini berusaha tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana model komunikasi publik pemberantasan hoaks dan *fakenews* menjelang Pemilu 2024 di Indonesia? Kedua, apa rahasia keberhasilan model komunikasi publik pemberantasan hoaks dan *fakenews* menjelang Pemilu 2024 di Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi model komunikasi publik pemberantasan hoaks dan *fakenews* menjelang Pemilu 2024 di Indonesia? Dengan demikian, penelitian tentang model komunikasi publik dalam pemberantasan hoaks dan *fakenews* menjelang Pemilu 2024 menemukan momentum dan signifikansinya.

Artikel ini berangkat dari tiga alasan. Pertama kehadiran model komunikasi publik menentukan efektivitas pemberantasan hoaks dan *fakenews* menjelang Pemilu 2024. Kedua, hoaks dan *fakenews* hanya bisa diberantas dengan usaha yang terpola, sistematis, dan berkelanjutan. Ketiga, pemberantasan hoaks dan *fakenews* mendorong literasi digital dan kebebasan pers yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Menurut (Arikunto, 2020) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subyek pada penelitian ini adalah Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalistik Indonesia dan Bapak Ian Chavidz Rizqiullah selaku Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Tangerang. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data primer dalam

bentuk wawancara secara langsung serta observasi dan data sekunder berupa dokumen, bentuk literatur dan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi data, teknik ini digunakan untuk lebih mengetahui mengenai kredibilitas dari data yang dikumpulkan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada *key informan* dan *informan*, peneliti mengetahui bahwa hoaks dan pemilu merupakan fenomena global dimana beberapa negara mempunyai permasalahan yang serupa. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, penyebaran hoaks dan berita palsu ini menyebar saat akan diadakannya pemilu. Penyebaran hoaks dan berita palsu ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon yang bertarung dalam pemilihan. Pemilu cenderung mempercayai informasi mengenai orang-orang yang dijadikan pilihan, sehingga masyarakat lebih rentan dalam menerima atau menyebarkan informasi yang membenarkan kepercayaan mereka dikarenakan Pemilu dapat membuat emosi dan ketegangan yang tinggi (Farida & Yoedjadi, 2020). Masyarakat harus dilatih tentang dengan cara mengakses menggunakan media dengan bijak, namun masyarakat Indonesia masih kesusahan untuk mengakses dan menggunakan media informasi dengan baik, hal ini peneliti ketahui berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalistik Indonesia yakni Ika “Masyarakat di era digital saat ini masih kesusahan untuk membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Di satu sisi literasi di pengaruhi oleh ideologi kemudian kepercayaan masyarakat. Meskipun program-program literasi makin banyak, tapi ketika masyarakat sendiri terbelah karena adanya ideologi atau karena fanatisme terhadap suatu kelompok dan suatu individu makin susah untuk menerima kebenaran dari kelompok lain yang dianggap berbeda pandangan. Peningkatan literasi belum dilakukan secara komprehensif, karena belum memasukkan literasi digital ini di dalam sebuah kurikulum formal. Dan hal ini hanya berupa *based on project* dari kominfo, sehingga kurang maksimal.” Berdasarkan wawancara diatas peneliti mengetahui bahwa sudah adanya program literasi yang dilakukan pemerintah yaitu dari pihak Kominfo, namun peningkatan literasi belum terlaksana atau dilakukan secara komprehensif. Ian selaku Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Tangerang juga menambahkan “masalah hoaks dari semenjak Kominfo berdiri di Kota Tangerang, fokusnya perihal berita hoaks. Karena ada banyak hoaks yang beredar. Pemerintah Kota juga sering mengadakan kampanye perihal kesadaran masyarakat terhadap hoaks. Untuk momen menjelang pemilu, pemerintah kota akan lebih aktif lagi untuk mengkampanyekan perihal hoaks, supaya tidak terjadi perpecahan.” Kang Iyan menuturkan bahwa Kominfo memfokuskan diri mengadakan kampanye perihal kesadaran masyarakat terhadap hoaks sehingga tidak menyebabkan perpecahan.

Dalam pendeteksian berita palsu dan hoaks belum tersedianya pendeteksi otomatis, namun mempunyai langkah tersendiri dalam menghadapi hoaks dan berita palsu ini yaitu dengan cara *debangking*. *Debangking* sendiri merupakan proses membantah atau proses verifikasi informasi yang memicu kekeliruan dan menyesatkan di media sosial. sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ika selaku Sekjen AJI “Mewakili Tempo, kami tidak melakukan deteksi otomatis terhadap hoaks. Yang dilakukan adalah kami melakukan *debangking*, yaitu proses memverifikasi dan membantah informasi yang keliru dan

menyesatkan di media sosial“. Ika juga menambahkan “Dalam penggunaannya pendeteksi otomatis ini juga harus dilakukan secara hati-hati dikarenakan hoaks yang berbeda kategori dan skalanya dengan artian sebuah informasi tidak bisa dikatakan 100% keliru sehingga verifikasi ulang dengan menggunakan mesin otomatis pendeteksi hoaks ini tidak akurat 100% sehingga diperlukannya verifikasi oleh manusia”. Sedangkan dari Pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta dikarenakan belum terdapatnya alat pendeteksi hoaks, kemudian Septiaji Eko Nugroho menyebutkan bahwa Mafindo akan mengadakan platform digital dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang dianggap membantu untuk mendeteksi berita palsu dan hoaks.

Kolaborasi yang telah terjalin antara platform media sosial dengan penerbit berita untuk Pemerintah Kota Tangerang menandakan langkah proaktif dalam memastikan informasi yang bersumber dari pemerintah dapat tersampaikan dengan lebih luas. Hal ini tercermin dari banyaknya berita yang diambil dari tulisan Pemerintah Kota Tangerang dan disebarkan melalui media sosial. Menurut penuturan Ika, yang merupakan salah satu pihak terlibat dalam kerjasama ini, kolaborasi dilakukan dengan menggandeng Meta. Kerjasama tersebut mencakup dukungan informasi yang bersifat viral, pendanaan, dan pengadaan training atau filtrasi. Dalam konteks ini, dukungan Meta tidak hanya mencakup aspek penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan pendanaan dan pelatihan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat mencapai audiens yang lebih luas. Septiaji Eko Nugroho menambahkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam kerjasama ini adalah bagaimana platform tersebut mengutamakan konten yang tidak bersifat menjatuhkan, terutama dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hal ini mencerminkan upaya platform media sosial untuk menjaga integritas dan keakuratan informasi yang disajikan kepada pengguna, sekaligus mencegah penyebaran konten yang bersifat merugikan atau hoaks. Dengan adanya kerjasama ini, Pemerintah Kota Tangerang menggandeng platform media sosial dan penerbit berita untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih terpercaya dan dapat diandalkan. Sinergi antara pihak-pihak terlibat, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menciptakan landasan yang kuat untuk mengatasi tantangan terkait validitas dan kredibilitas informasi di era digital saat ini. Evaluasi terus-menerus atas efektivitas kolaborasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan penyampaian informasi yang benar dan akurat dapat tercapai secara maksimal.

Implikasi model komunikasi dari Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka pemberantasan berita palsu adalah dengan komunikasi yang transparan. Komunikasi transparan dilakukan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat sehingga akan menyebabkan menyelenggarakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih memperhatikan bahan bacaan yang hendak di baca sesuai yang dituturkan oleh Kang Ian bahwa “Dari pihak pemkot secara khusus kita sudah menyebarkan informasi terkait program pemberantasan dan pencegahan berita hoaks. Bahkan dalam kegiatan sosialisasi program-program dari pemerintah kota, kita selalu menyelipkan perihal kampanye anti berita hoaks”. Akuntabilitas media menurut Pemerintah Kota Tangerang dianggap kurang netral dan lebih memihak ke pasangan calon tertentu. Merujuk pada keadaan di mana proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak dilakukan secara adil, objektif, atau tidak memihak. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak-pihak tertentu, seperti pemimpin atau institusi, untuk

bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ika bahwa “Media menjadi salah satu masalah atas maraknya hoaks. Jadi menurunkan kepercayaan terhadap media karena adanya pemilik media yang terjun langsung di politik praktis”. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang sudah banyak media yang independen tentunya menjunjung kredibilitas sumber dan berita. Jika dilihat dari sisi media terlihat sudah ada langkah yang dilakukan untuk penghapusan berita palsu yang bersumber dari media dengan cara pelatihan jurnalis dan *newsroom* sehingga jurnalis dapat membandingkan antara data yang kredibel dan berita palsu. Sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ika “Upaya untuk peningkatan media untuk melawan hoaks sudah dilakukan dari tahun 2018, dengan melatih jurnalis dan *newsroom* supaya mampu mendibang hoaks. Media juga mampu mengantisipasi hoaks. Adanya berita yang viral, sekarang bisa langsung dicek oleh jurnalis. Kerjasama dengan kampus, melatih komunitas juga sudah semakin banyak dilakukan oleh para jurnalis.”

Model komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk mengakses informasi. Kang Iyan, seorang perwakilan dari pemerintah setempat, menyatakan, "Kalau dibilang memenuhi target atau belum, perihal itu belum bisa dipastikan, tapi kami sudah masif melakukan kegiatan literasi media dan informasi ke sekolah-sekolah dan beberapa tempat umum. "Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya literasi media dan informasi. Langkah-langkah yang bersifat masif, khususnya kegiatan literasi di sekolah-sekolah dan tempat umum, menunjukkan pendekatan yang inklusif dalam menyediakan akses kepada informasi yang benar dan akurat. Pemerintah setempat menyadari bahwa literasi media dan informasi merupakan kunci untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis. Dengan menggelar kegiatan ini di sekolah-sekolah, mereka tidak hanya mencapai generasi muda tetapi juga membantu membangun pondasi pengetahuan yang kuat di kalangan anak-anak dan remaja. Selain itu, kegiatan di tempat umum menunjukkan kesadaran akan kebutuhan untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang mungkin tidak terjangkau melalui sistem pendidikan formal. Meskipun belum dapat memastikan pencapaian target secara spesifik, pendekatan masif ini mengindikasikan upaya serius untuk meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan masyarakat. Keberlanjutan dan evaluasi terus-menerus dari model komunikasi ini akan menjadi kunci untuk mengukur dampaknya dan membuat penyesuaian yang diperlukan guna memenuhi tujuan jangka panjang terkait literasi media dan informasi di tengah masyarakat Tangerang.

Kualitas moral yang mencerminkan kejujuran dalam pemilihan umum memainkan peran krusial dalam membentuk dan memelihara integritas proses demokratis. Kemampuan untuk memengaruhi pendapat publik terhadap kandidat, partai politik, atau proses pemilu dapat menjadi kekuatan yang besar dalam membentuk arah dan hasil suatu pemilihan. Namun, ketika kualitas moral ini dipertaruhkan, terutama melalui penggunaan informasi palsu, potensi munculnya ketidaksetaraan dan penyimpangan dalam proses demokratis menjadi sangat nyata, menciptakan distorsi yang merugikan. Informasi palsu, yang dapat merangkum berita palsu atau narasi yang menyesatkan, menjadi alat yang berpotensi berbahaya dalam tangan pihak-pihak tertentu. Penggunaan informasi palsu dapat memanipulasi opini publik, mengarahkan dukungan pemilih, atau bahkan

mempengaruhi hasil pemilihan sehingga tidak mencerminkan pilihan kolektif secara bebas dan adil. Dengan kata lain, distorsi yang disebabkan oleh informasi palsu dapat merusak integritas proses demokratis dengan cara yang menciptakan ketidaksetaraan dan menggagalkan tujuan dasar demokrasi itu sendiri. Pentingnya kejujuran dalam pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan integritas individu atau partai politik, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem demokratis. Jika informasi palsu mendominasi pandangan politik, kepercayaan publik dapat terkikis, dan masyarakat dapat merasa terpinggirkan atau terjebak dalam lingkaran distorsi informasi. Upaya untuk melawan distorsi dalam proses demokratis harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mengembangkan regulasi yang efektif untuk mengendalikan penyebaran informasi palsu, sementara media harus memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik dan memberikan informasi yang akurat. Masyarakat sipil dapat berkontribusi melalui advokasi untuk literasi media dan partisipasi aktif dalam memantau dan melaporkan informasi palsu. Dengan menjaga kualitas moral yang tinggi dalam pemilihan umum, masyarakat dapat memastikan bahwa proses demokratis berlangsung secara adil, transparan, dan mencerminkan suara kolektif dengan integritas yang tidak tergoyahkan.

Informasi palsu yang merajalela memiliki dampak serius terutama dalam menciptakan konflik dan ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat (Purba et al., 2023). Fenomena ini menjadi semakin mendalam, terutama ketika terjadi selama masa pemilihan umum, karena dapat menjadi katalisator bagi kerusuhan dan ketidakstabilan sosial yang merugikan. Dalam konteks ini, memerangi penyebaran berita palsu, terutama yang bersifat provokatif, menjadi tidak hanya suatu keharusan, tetapi juga menjadi keharusan yang mendesak untuk menjaga stabilitas dan ketertiban selama periode demokratis ini. Penyebaran berita palsu selama masa pemilihan umum memiliki potensi untuk memicu kerusuhan dan konflik sosial. Ketika informasi yang tidak benar atau menyesatkan disebarluaskan, hal ini dapat memperkuat perpecahan dalam masyarakat, memicu pertentangan antar kelompok, dan bahkan menyebabkan konfrontasi fisik. Dampaknya bukan hanya pada tingkat sosial, tetapi juga dapat menciptakan kerenggangan yang mendalam dalam struktur politik dan demokratis. Pentingnya memerangi penyebaran berita palsu terutama yang bersifat provokatif menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa pemilihan umum. Upaya pencegahan dan penanggulangan termasuk peningkatan literasi media di kalangan masyarakat, pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap konten di media sosial, serta kampanye penyadaran publik tentang risiko informasi palsu. Dalam hal ini, peran aktif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan media menjadi sangat penting. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk melawan penyebaran informasi palsu, sementara lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menindak tegas pelaku penyebaran informasi palsu sesuai dengan hukum yang berlaku. Media juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan menjaga kewaspadaan terhadap penyebaran berita palsu, terutama selama masa pemilihan umum, masyarakat dapat memastikan bahwa proses demokratis berlangsung dengan damai dan adil. Pencegahan penyebaran informasi palsu menjadi landasan utama dalam membangun iklim demokratis

yang sehat, dimana masyarakat dapat membuat keputusan informasional dan mendukung pilihan mereka dengan keyakinan yang kuat.

Dalam konteks pemilihan umum, pentingnya kejelasan informasi menjadi pilar utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi memegang peran kunci dalam kesuksesan dan integritas suatu sistem demokratis. Masyarakat yang memiliki akses kepada informasi yang benar dan akurat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap proses demokratis yang sedang berlangsung. Kejelasan informasi menciptakan fondasi yang kokoh untuk partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar mengenai kandidat, isu-isu politik, dan proses pemilihan, mereka lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum merupakan indikator kesehatan demokrasi, menciptakan representasi yang lebih akurat dari keinginan dan aspirasi masyarakat. Kepercayaan yang tinggi juga memiliki dampak positif dalam memperkuat fondasi demokrasi. Masyarakat yang percaya pada keadilan dan transparansi proses pemilihan cenderung lebih menerima hasilnya, bahkan jika hasil tersebut tidak selalu sesuai dengan preferensi individu. Kepercayaan ini mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem demokratis, menghindari ketidakpuasan yang dapat memicu ketegangan sosial. Selain itu, kepercayaan publik yang tinggi membantu membangun kultur politik yang sehat, di mana masyarakat lebih terbuka terhadap dialog dan kerjasama. Kedekatan antara pemerintah dan masyarakat tercipta melalui kejelasan informasi, memungkinkan kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kejelasan informasi bukan hanya menjadi sarana untuk memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokratis dan merasa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk arah masa depan negara mereka.

Suasana yang bersih dari informasi palsu bukan hanya menciptakan lingkungan yang aman, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan pertukaran ide dan debat yang sehat. Masyarakat yang terinformasi dengan benar memegang peran sentral dalam membangun fondasi yang kokoh untuk sebuah budaya demokratis yang inklusif dan didasarkan pada kebenaran. Beberapa aspek yang perlu diperluas untuk lebih memahami dampak positif dari lingkungan yang bebas dari informasi palsu termasuk, masyarakat yang terbebas dari informasi palsu dapat merumuskan pendapat mereka berdasarkan fakta yang akurat. Ini memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan pandangan yang rasional dan informasional. Dengan terpaparnya informasi yang benar, masyarakat dapat lebih memahami isu-isu yang kompleks dan nuansa yang terkait. Ini membantu menghindari penyederhanaan yang tidak akurat dan mempromosikan diskusi yang lebih mendalam. Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu terkini akan lebih cenderung berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi publik. Hal ini menciptakan atmosfer dialog yang sehat dan produktif. Masyarakat yang terbebas dari informasi palsu cenderung menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, toleransi terhadap perbedaan, dan partisipasi aktif dalam proses demokratis. Keputusan yang diambil oleh masyarakat yang terinformasi dengan benar cenderung didasarkan pada pertimbangan yang lebih mendalam dan akurat. Ini memiliki dampak positif terhadap kualitas

keputusan yang dihasilkan dalam konteks politik dan sosial. Lingkungan yang bebas dari informasi palsu dapat membantu mengurangi polarisasi di antara masyarakat. Masyarakat yang memahami kerangka pemikiran orang lain lebih mungkin untuk mencari solusi yang inklusif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan menciptakan atmosfer yang mendukung pertukaran ide yang sehat dan partisipasi masyarakat yang aktif, lingkungan yang bersih dari informasi palsu berperan penting dalam membangun fondasi demokratis yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi dapat lebih optimal terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penting untuk menerapkan kolaborasi aktif antara berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses demokratis, terutama selama pemilihan umum. Pemerintah, media, dan masyarakat sipil dapat berperan bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari dampak negatif informasi palsu. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil termasuk,

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menghadapi penyebaran informasi palsu, terutama selama periode pemilihan umum, tidak dapat diabaikan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah harus mengambil peran aktif dengan mengembangkan regulasi yang efektif untuk menanggulangi penyebaran informasi palsu. Regulasi ini perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika informasi agar tetap relevan dan mampu mengatasi metode baru yang mungkin digunakan oleh pihak yang ingin menyebarkan informasi palsu.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara terbuka dan adil, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan. Tindakan transparan ini mencakup penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari campur tangan, pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan prosedur, dan memberikan akses yang lebih luas kepada para pemantau dan media.

Selain regulasi dan transparansi, pemerintah juga memiliki peran dalam meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan masyarakat. Melalui kampanye literasi media dan informasi, pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menyaring dan menginterpretasikan informasi yang mereka terima. Pendidikan ini membantu masyarakat menjadi lebih kritis dan bijak dalam mengonsumsi berita, mengurangi potensi penyebaran informasi palsu dan meningkatkan kesadaran akan bahayanya. Dengan melibatkan pemerintah dalam upaya ini, dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dari informasi palsu selama pemilihan umum. Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan kunci, memiliki potensi untuk membentuk aturan main yang mendukung integritas demokrasi dan memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan informasional yang tepat selama proses pemilihan.

Peran media dalam menjaga integritas informasi selama pemilihan umum memiliki dampak besar terhadap kesehatan demokrasi. Pertama-tama, media diharapkan untuk mengadopsi standar etika dan integritas jurnalistik yang tinggi. Ini berarti memeriksa keakuratan informasi sebelum menyebarkannya dan menyajikan informasi secara seimbang dan berimbang. Dengan memastikan bahwa berita yang disampaikan benar dan terverifikasi, media dapat menjadi penjaga kebenaran dan keadilan dalam proses demokratis. Kolaborasi antara media dan pemerintah juga merupakan langkah penting dalam melawan disinformasi. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi dan

sumber daya antara dua pihak, memperkuat upaya untuk mendeteksi dan menanggulangi informasi palsu. Selain itu, media dan pemerintah dapat bersama-sama menyusun strategi untuk melibatkan masyarakat dalam upaya edukasi publik tentang risiko disinformasi. Ini mencakup penyuluhan tentang cara mengenali dan menanggapi berita palsu serta mengembangkan literasi media di kalangan masyarakat.

Keterlibatan media dalam mendukung edukasi publik juga dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang proses demokratis. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipercaya, media membantu membentuk opini publik yang terinformasi. Ini tidak hanya menguntungkan masyarakat secara individual tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pemilihan umum. Dengan demikian, peran media tidak hanya sebagai penyampai berita tetapi juga sebagai katalisator untuk keberhasilan proses demokratis. Melalui penerapan standar etika, kerja sama dengan pemerintah, dan upaya edukasi publik, media dapat menjadi garda terdepan dalam melawan disinformasi dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional dan cerdas selama pemilihan umum.

Peran masyarakat sipil dalam melawan penyebaran informasi palsu selama pemilihan umum memiliki dampak besar terhadap integritas demokrasi. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi dan melaporkan konten yang dianggap meragukan atau berpotensi merugikan. Dengan menjadi mata dan telinga yang berhati-hati terhadap informasi yang beredar, masyarakat sipil dapat membantu mendeteksi dan menanggulangi berita palsu sebelum merambah ke lebih banyak individu. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi publik dalam upaya memerangi informasi palsu. Melalui kampanye sosial, seminar, dan kegiatan literasi media di komunitas, mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bahaya informasi palsu dan cara mengidentifikasinya. Kampanye sosial dapat membangkitkan kesadaran, seminar dapat memberikan platform untuk diskusi mendalam, dan kegiatan literasi media dapat memberikan keterampilan praktis untuk menyaring informasi.

Partisipasi publik yang ditingkatkan adalah kunci dalam melawan informasi palsu, karena masyarakat yang terlatih dapat menjadi agen pembela kebenaran dan keadilan. Melalui kampanye yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan menanggapi informasi, masyarakat sipil dapat membentuk warga yang lebih kritis dan bertanggung jawab secara informasional. Dengan demikian, peran masyarakat sipil dalam pemilihan umum melibatkan tindakan proaktif untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan membangun masyarakat yang terlatih secara informasional. Melalui pengawasan dan partisipasi publik, masyarakat sipil dapat berkontribusi secara signifikan untuk menjaga integritas demokrasi, memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan, dan memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada informasi yang akurat.

Peningkatan literasi media menjadi langkah krusial dalam menghadapi tantangan informasi palsu selama pemilihan umum. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengintegrasikan pendidikan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan memasukkan aspek literasi media ke dalam pembelajaran sejak dini, kita dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis. Kurikulum pendidikan yang mencakup literasi media dapat memberikan

pemahaman kepada siswa tentang bagaimana menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan cerdas. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan literasi media untuk masyarakat umum juga sangat penting. Melalui pelatihan ini, masyarakat dapat diberikan keterampilan praktis dalam pengenalan dan penilaian informasi yang akurat. Fokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu, memahami sumber informasi, dan menilai keberimbangan berita dapat meningkatkan kewaspadaan dan kecerdasan masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang kompleks dan seringkali menyesatkan.

Pelatihan literasi media tidak hanya mendidik individu tentang cara memilah informasi yang sah, tetapi juga membentuk kritisitas dan kehati-hatian dalam menanggapi berita atau informasi yang diterima. Ini menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami risiko informasi palsu tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agen pembela kebenaran dan keadilan informasional. Dengan demikian, upaya meningkatkan literasi media melibatkan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan formal melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan informal untuk masyarakat umum. Dengan memberdayakan generasi mendatang dan masyarakat secara keseluruhan dengan keterampilan literasi media yang kuat, kita dapat mengurangi dampak negatif informasi palsu dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Promosi transparansi dalam sumber dan pembiayaan informasi memegang peranan sentral dalam menjaga integritas demokrasi dan meminimalkan risiko penyebaran informasi palsu selama pemilihan umum. Mendorong transparansi dalam sumber informasi, baik dari pemerintah maupun media, adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Transparansi dalam pembiayaan informasi juga penting, karena dapat membantu mengungkap potensial konflik kepentingan yang dapat memengaruhi naratif dan presentasi informasi. Memberikan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi adalah langkah praktis untuk mengukur transparansi. Dengan menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, pemerintah dan media dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Akses terbuka ini memberikan masyarakat alat untuk menguji kebenaran informasi dan mengevaluasi klaim yang dibuat oleh kandidat atau pihak tertentu. Ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan, dengan dasar informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Transparansi dalam sumber dan pembiayaan informasi juga membantu mengurangi potensi manipulasi informasi oleh pihak-pihak tertentu. Dengan mengetahui dari mana informasi berasal dan bagaimana dibiayai, masyarakat dapat lebih kritis dan waspada terhadap potensi bias atau kepentingan tertentu yang mungkin mempengaruhi presentasi informasi. Ini memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas, serta mencegah manipulasi informasi yang dapat merugikan integritas pemilihan umum. Dengan demikian, promosi transparansi bukan hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap penyebaran informasi palsu. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat menjadi lebih terlatih dalam menyaring informasi, membangun kepercayaan pada proses pemilihan umum, dan memperkuat integritas demokrasi secara keseluruhan. Melalui

kerjasama yang kokoh dan upaya bersama, langkah-langkah ini dapat menciptakan pemilihan umum yang lebih fair, berintegritas, dan mampu memperkuat fondasi demokrasi yang sehat di masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini mencatat bahwa hoaks dan berita palsu merupakan fenomena global yang terjadi sebelum pemilihan umum. Penyebaran informasi palsu bertujuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon pemilihan. Masyarakat cenderung mempercayai informasi yang membenarkan keyakinan mereka, terutama di masa menjelang pemilu yang cenderung emosional dan tegang. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya literasi media dan informasi, ada tantangan dalam mendeteksi hoaks secara otomatis. Proses pendeteksian hoaks melibatkan verifikasi manual oleh manusia karena keberagaman jenis hoaks dan kompleksitas konten yang sulit diukur dengan akurasi oleh algoritma otomatis. Kolaborasi dengan platform media sosial dan pelibatan penerbit berita juga terjadi untuk menanggulangi masalah hoaks. Namun, ada kendala dalam akuntabilitas media yang dianggap kurang netral dan cenderung memihak kepada pasangan calon tertentu. Pemilik media terkadang terlibat langsung dalam politik praktis, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Meskipun telah ada upaya pelatihan jurnalis dan *newsroom* untuk memerangi hoaks, masih ada perluasan kerjasama dan pelatihan komunitas untuk melawan fenomena ini. Model komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang bertujuan untuk memastikan akses informasi yang setara untuk seluruh lapisan masyarakat. Meskipun upaya literasi media telah dilakukan secara masif, tantangan tetap ada dalam menghadapi penyebaran informasi palsu, yang membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk melawan hoaks dan menjaga integritas proses demokratis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada kepada Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalistik Indonesia dan Ian Chavidz Rizqiullah selaku Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Wahyono, S. B., & Persadha, P. D. (2019). Audience culture in the reception of text: Black campaigns on online media during Indonesia's 2014 and 2019 presidential elections. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(1), 493–500. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7156>
- Arwendria, A., & Oktavia, A. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Mengendalikan Berita Palsu. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 40(2), 195. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.484>
- Aditiawarman, & Mac. (2019). Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya. In *Lemabaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo*. <https://books.google.co.id/books?id=etXKDwAAQBAJ&pg=PA80&dq=ujaran+kebencia>

n&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjHuayku4TuAhUOWX0KHVcJBaIQ6AEwA3oECAUQ
Ag#v=onepage&q=ujaran kebencian&f=false

- Farida, L., & Yoedtadi, M. G. (2020). Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom.id). *Koneksi*, 3(2), 358. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6395>
- Lukman Hakim, Achluddin Ibnu Rochim, B. Pr. (2022). Hoax Dalam Ilustrasi Jean Baudrillard. *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 02(2), 40–48.
- Megasari, P. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA DALAM MENANGANI BERITA HOAX (Studi kasus di kota Surabaya) Pitri Megasari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rukeman no 36 rt 03 gatak tamantirto Email : Megasarifitri1@gmail.com Pendahuluan Paper ini akan membicarakan ata. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 67-83.
- Nurlatun, R., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Pitri Megasari. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA DALAM MENANGANI BERITA HOAX (Studi kasus di kota Surabaya). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(36), 67–83.
- Sabrina, A. R. (2019a). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 5(2), 31. <https://doi.org/10.37535/101005220183>
- Yashila, P., & Athifahputih, R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. 10(c), 64–77.
- Nasional, L. K., & Indonesia, R. (2023). *Opini Positif Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Oleh : Artanto , S. I. K ., M . Si Kombes Pol Nrp 72120382 Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan Lxv Lemhannas Ri Tahun 2023.*
- Purba, V. F., Batu, R. B. L., Perangin-Angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital. *Indonesian Journal of ...*, 1(3), 477–485. <http://www.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/79%0Ahttp://www.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/79/54>
- Sastradipraja, C. K., Faradillah, F., & Kirana, N. (2021). Pendampingan Penerapan Internet Sehat dan Aman di Posyandu Remaja UPT Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung. *Community Empowerment*, 6(2), 216–222.
- Ulfa, M. (2024). *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Menjaga Moderasi Beragama di Era Digital : Tantangan dan Strategi Menghadapi Teknologi Maintaining Religious Moderation in the Digital Age : Challenges and Strategies for Facing Technology B.* 3(1), 43–63.
- Zakirah, A., & Marta, D. (2020). Pengaruh Hoax Di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remaja Di Surabaya. *Mediakita*, 4(1), 37–36. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2446>